

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan *domestic salience* dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi norma internasional didalam ranah domestik, dengan memperhatikan wacana politik domestic, kebijakan negara, dan perubahan institusi nasional maka UNCRC menempati posisi *low domestic salience* dalam kasus penerapan *sharia penal code* di Brunei Darussalam. Hal tersebut dikarenakan UNCRC dinilai gagal dalam melakukan perubahan institusional Brunei dalam kasus penerapan *sharia penal code*. Dalam analisis mengukur tingkat *domestic salience*, kegagalan UNCRC dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu *Political Rhetoric*, *Domestic Interest*, *Domestic Institution*, *Cultural Match*, dan *Socializing Forces*.

MIB sebagai ideologi negara merupakan alasan utama yang menyebabkan implementasi UNCRC terhambat. Ideologi MIB juga menciptakan sistem pemerintahan yang kesultanan absolut yang menyebabkan sultan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan dan tidak ada yang bisa membantahnya. Dalam kasus *sharia penal code* sistem pemerintahan yang monarki absolut ini memberikan peluang besar untuk Sultan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakatnya mengenai kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai *syariat* ini. Sehingga tumbuhlah pemahaman kolektif mengenai kebijakan *sharia penal code* dan mempermudah penerapannya. Padahal jika melihat dalam kacamata *political rhetoric*, posisi Sultan ini dianggap gagal dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai dari UNCRC sehingga didalam

masyarakat tidak tumbuh pemahaman kolektif mengenai prinsip-prinsip dari UNCRC.

Munculnya *image* atau identitas yang dibawa oleh Brunei sebagai identitas domestik yang berarti, identitas Islam ini berpengaruh dalam menentukan orientasi kebijakan dari Brunei Darussalam dan muncul sebagai norma domestik. Dalam kasus *sharia penal code* identitas sebagai negara Islam ini memberikan dampak yang signifikan dalam pembuatan hukum islam yang tertuang dalam *sharia penal code* 2013 ini. Kesesuaian antara norma domestik dan norma internasional akan dapat mempermudah implementasi suatu norma internasional didalam ranah domestik. Namun, dalam kasus penerapan *sharia penal code* 2013 ini identitas yang berlaku di Brunei yakni identitas Islam tidak sesuai dengan identitas didalam UNCRC yang notabene beridentitas yang liberal (tidak melibatkan agama) dan kepentingan yang berlaku di Brunei yakni membentuk hukum Islam yang sesuai dengan *syariat* ini tidak sesuai dengan kepentingan UNCRC yakni membentuk hukum yang berasaskan pada standart perilaku manusia. Sehingga tidak adanya kesesuaian ini berdampak pada munculnya kebijakan *sharia penal code* di Brunei yang tidak sesuai dengan kepentingan UNCRC.

Kegagalan implementasi UNCRC di Brunei Darussalam juga tidak luput karena adanya gagalnya proses transformasi UNCRC menjadi hukum domestik Brunei. Misalnya perbedaan patokan umur dalam memberlakukan hukuman kepada anak, jika dalam *sharia penal code* patokan usia anak ditentukan dengan *baligh* yang berarti untuk anak-anak dibawah usia 15 tahun sedangkan dalam UNCRC patokan umur anak-anak adalah dibawah 18 tahun. Selain itu UNCRC pada pasal

37 yang secara eksplisit melarang negara untuk menerapkan segala bentuk penyiksaan atau perlakuan dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi sangat berbeda dengan pasal yang ada di *sharia penal code* yang membolehkan negara memberikan sanksi kepada anak-anak. Perbedaan pasal yang cukup signifikan ini membuktikan bahwa UNCRC gagal bertransformasi didalam hukum domestik Brunei. Kecocokan Budaya anantara Brunei dan UNCRC juga berdampak pada proses implementasi UNCRC di Brunei. Budaya yang berlaku di Brunei yakni budaya yang masih Islam konservatif sangat berbeda dengan budaya yang berlaku di UNCRC yakni budaya yang liberal progressif. Ketidakcocokan ini yang kemudian mempersulit implementasi UNCRC didalam ranah domestik Brunei Darussalam.

Kegagalan implelementasi UNCRC ini juga tidak lepas karena gagalnya rekontruksi internal dan juga pengaruh dari pihak eksternal untuk membujuk petinggi Brunei dalam mencabut kebijakan *sharia penal code*. rekontruksi internal ini dinilai gagal membawa nilai UNCRC didalam masyarakat Brunei karena minimnya perhatian yang diberikan oleh Sultan terhadap kritikan atas *sharia penal code* yang dilakukan oleh komunitas non-Muslim. Selain itu, upaya eksternal yang dilakukan oleh sejumlah organisasi internasional, dan beberapa pemimpin negara gagal dalam membuat sultan menarik kebijakan ini.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini dibuat dengan mengacu pada satu sudut pandang yakni *domestic salience* yang mengikuti alur pikir dari Andrew P. Cortell dan James W. Davis. Dengan demikian, hal tersebut membuka kesempatan bagi peneliti

selanjutnya untuk dapat menganalisis kasus ini dengan sudut pandang yang berbeda yang sangat membantu dalam memperkaya pandangan dalam menanggapi suatu fenomena yang ada. Saran bagi peneliti selanjutnya ialah untuk melakukan penelitian dengan kasus yang sama namun dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya itu, jika peneliti ingin melakukan penelitian mengenai keberhasilan implementasi norma internasional dapat menggunakan studi kasus yang lebih beragam. Dengan demikian, akan dapat memperkaya referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi norma internasional didalam ranah domestik.